

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022-2023

Anggih¹ Roni² Yenny Ernitawati³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: anggih12.com@gmail.com¹ roniumus18@gmail.com² yennyernitawati@gmail.com³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai pengaruh PAD, Belanja Modal, dan DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes tahun 2022-2023. Penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dengan data sekunder yang digunakan dan didapatkan dari kantor BPKAD Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji klasik, linier berganda, uji hipotesis t, uji f, dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan fitur SPSS 22. Pada penelitian ini hasilnya menunjukkan PAD berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemudian belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan untuk DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dapat disimpulkan PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun tidak dengan dana alokasi umum yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum

Abstract

The aim of this research is to find out the influence of PAD, Capital Expenditures and DAU on the financial performance of the regional government of Brebes Regency in 2022-2023. Quantitative descriptive research used in this research with secondary data used and obtained from the Brebes Regency BPKAD office. This research uses descriptive analysis, classical test, multiple linear, t hypothesis test, f test, and coefficient of determination test using SPSS 22 features. In this research the results show that PAD has a positive and significant effect on local government financial performance, then capital expenditure has a positive effect but it is not significant for regional government financial performance, and for DAU it has no effect on regional financial performance. It can be concluded that PAD and capital expenditure influence regional government financial performance, but not general allocation funds which do not influence regional government financial performance.

Keywords: Regional Original Income, Capital Expenditures, and General Allocation Funds



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan perekonomian setiap daerah sudah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri karena negara Indonesia ini sudah mengikuti asas desentralisasi pada beradanya otonomi daerah ini yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 (Pratiwi 2019). Otonomi daerah ialah suatu wewenang untuk memberikan aturan dalam menangani keperluan masyarakat daerah yang didasari dengan peraturan UU Cholily (Anggih and Kharisma 2023). Adanya otonomi daerah pemerintah daerah bisa melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dengan menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing dalam hal pengelolaan keuangan supaya tepat sasaran dan juga lebih efektif (Faizah 2022). Suatu daerah dikatakan sebagai daerah otonomi ialah ketika dapat diketahui dari kemampuan keuangan daerahnya. Diterapkannya suatu aturan otonomi di suatu

daerah dapat menyebabkan pada keuangan daerah wajib dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah supaya bisa diselesaikan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat maka dari itu pengukuran kinerja keuangan keuangan daerah harus dilakukan. Pengukuran kinerja keuangan daerah memerlukan suatu pengukuran penilaian agar lebih kompleks karena variabel-variabel yang dapat digunakan untuk bisa mengukur kinerja keuangan daerah banyak jenisnya seperti Pendapatan asli daerah, belanja modal dan Dana Alokasi Umum dan banyak metode untuk pengukuran sehingga tidak bisa menggunakan satu variabel saja.

Kinerja keuangan pemerintah bisa di ukur dari seberapa kuat kemampuan pemerintah pada daerah supaya bisa menemukan potensi yang ada didaerahnya agar dapat menemukan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya. Kinerja keuangan daerah pada penelitian ini menggunakan rasio efisiensi pada pendapatan dan belanja daerah. Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten yang sudah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah dari pusat dalam menjalankan otonomi didaerahnya. Dengan memberikan tanggung jawab ini pastinya pemerintahan Kabupaten Brebes sangat berharap agar bisa menemukan potensi baru yang ada didaerahnya supaya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan dari pusat, Kabupaten Brebes sudah mendapatkan predikat sampai empat kali secara terus-menerus yang diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Brebes ialah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2019 sampai tahun 2022 (Muafiq and Chariri 2023). Akan tetapi menurut (Prihatin et al. 2022) Kabupaten Brebes masih sangat kurang baik dalam pengelolaan keuangannya.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022-2023

Bulan	Pendapatan daerah Tahun 2022	Pendapatan daerah Tahun 2023	Belanja daerah Tahun 2022	Belanja daerah Tahun 2023
Januari	216.071.272.190	178.955.251.669	59.038.623.259	79.755.371.785
Februari	402.333.266.360	197.335.314.421	122.205.902.871	79.435.902.209
Maret	683.415.408.592	363.777.300.632	224.295.804.201	112.691.629.482
April	888.926.997.689	257.548.461.576	471.953.015.096	244.598.051.128
Mei	1.069.869.604.727	145.288.525.905	574.475.011.117	140.636.021.987
Juni	1.334.283.989.608	186.271.255.770	713.147.705.770	260.247.834.896
Juli	1.545.784.387.413	518.108.347.809	973.713.712.231	175.724.069.340
Agustus	1.734.640.705.136	194.459.902.572	1.125.579.421.468	221.454.818.311
September	1.946.749.842.682	194.147.695.120	1.260.851.953.934	188.414.095.861
Oktober	2.122.219.010.081	326.232.939.796	1.402.464.936.415	212.024.754.045
November	2.419.562.887.288	218.285.470.275	1.641.169.312.042	213.928.752.818
Desember	2.989.821.990.874	294.600.713.520	2.436.865.762.468	548.976.291.578

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah(BPKAD) (data diolah.2024)

Pendapatan Asli Daerah dihasilkan melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan pendapatan lain-lain yang sah yang sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah (Febrianty and Putra 2023). Pendapatan Asli Daerah memiliki arti penting untuk dapat digunakan dalam menjalankan roda pemerintah serta mendorong kesejahteraan pada masyarakat. Semakin besarnya pendapatan asli daerah maka semakin kecilnya pemerintah daerah bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Tabel Dibawah ini adalah tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes 2022-2023.

Tabel 2. Realisasi PAD Kabupaten Brebes 2022-2023

Bulan	Realisasi PAD Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	Realisasi PAD Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan
Januari	10.745.866.490	0,00	26.071.132.286	-0,94
Februari	31.375.153.036	1,92	20.246.601.314	-0,22

Maret	46.418.020.520	0,48	39.562.811.991	0,95
April	58.582.131.285	0,26	34.909.696.690	-0,12
Mei	70.970.468.737	0,21	48.895.490.722	0,40
Juni	86.290.858.877	0,22	45.511.928.756	-0,07
Juli	102.535.611.705	0,19	39.629.152.790	-0,13
Agustus	124.126.268.824	0,21	47.857.769.849	0,21
September	145.917.071.320	0,18	38.157.935.399	-0,20
Oktober	161.178.350.598	0,10	37.980.475.028	-0,00
November	176.236.679.578	0,09	42.963.544.814	0,13
Desember	419.395.415.995	1,38	58.149.605.745	0,35

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah(BPKAD) (data diolah.2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes untuk setiap tahunnya selalu ada fluktuasi yakni perubahan naik turun. Pada bulan Januari tahun 2022 ada kenaikan ke bulan Februari tahun 2022 sebanyak 1,92 kemudian pada bulan Maret tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,48 pada bulan April tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebanyak 0,25 pada bulan Mei tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,21 pada bulan Juni tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,22 pada bulan Juli tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,19 pada bulan Agustus tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,21 pada bulan September tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,18 pada bulan Oktober tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,10 pada bulan November tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,09 pada bulan Desember tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1,38 namun pada bulan Januari tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak -0,94 pada bulan Februari tahun 2023 mengalami penurun lagi sebanyak -0,22 kemudian pada bulan Maret tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 0,95 pada bulan April tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebanyak -0,12 pada bulan Mei tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 0,40 pada bulan Juni tahun 2023 mengalami penurun sebanyak -0,07 pada bulan Juli tahun 2023 mengalami penurun sebanyak -0,13 pada bulan Agustus tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebanyak 0,21 pada bulan September tahun 2023 mengalami penurun sebanyak -0,20 pada bulan Oktober tahun 2023 mengalami penurun sebanyak -0,00 pada bulan November tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 0,13 dan pada bulan Desember tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebanyak 0,35 Dengan ini yang menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes mengalami ke tidak seimbangan pada Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sampai 2023. Kemudian Belanja modal dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal

Bulan	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan
Januari	0	0,00	0	-1,00
Februari	458.544.400	1,00	27.316.000	1,00
Maret	8.987.264.798	18,60	1.545.254.800	55,57
April	29.392.111.146	2,27	4.082.694.074	1,64
Mei	56.313.320.752	0,92	3.928.415.466	-0,04
Juni	93.133.145.395	0,65	17.116.143.495	3,36
Juli	160.154.844.457	0,72	24.801.706.778	0,45
Agustus	205.676.569.811	0,28	42.652.388.974	0,72
September	246.378.388.552	0,20	53.144.084.189	0,25
Oktober	273.438.252.941	0,11	35.366.835.799	-0,33
November	312.865.183.955	0,14	58.975.630.258	0,67
Desember	480.672.283.614	0,54	116.281.572.066	0,97

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah(BPKAD) (data diolah.2024)

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja modal Kabupaten Brebes untuk setiap tahunnya selalu ada fluktuasi yakni perubahan naik turun. Pada bulan Januari tahun 2022 ada kenaikan ke bulan Februari tahun 2022 sebanyak 1,00 kemudian pada bulan Maret tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 18,60 pada bulan April tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebanyak 2,27 pada bulan Mei tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,92 pada bulan Juni tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,65 pada bulan Juli tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,72 pada bulan Agustus tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,28 pada bulan September tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,20 pada bulan Oktober tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,11 pada bulan November tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,14 pada bulan Desember tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,54 namun pada bulan Januari tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak -1,00 pada bulan Februari tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sebanyak 1,00 kemudian pada bulan Maret tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 55,57 pada bulan April tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebanyak 1,64 Namun pada bulan Mei tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak -0,04 pada bulan Juni tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 3,36 pada bulan Juli tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 0,45 pada bulan Agustus tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebanyak 0,72, pada bulan September tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 0,25 namun pada bulan Oktober tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak -0,33 pada bulan November tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 0,67 dan pada bulan Desember tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebanyak 0,97 Dengan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes mengalami ke tidak seimbangan pada Belanja modal pada tahun 2022 sampai 2023.

Dana perimbangan yaitu sumber dari pendapatan daerah yang didapatkan dari APBN yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi untuk daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat agar lebih baik. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 mengenai perimbangan keuangan bahwa perimbangan salah satunya terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU)). DAU adalah salah satu dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang asalnya dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi (Ardhana 2023). Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 mengenai perimbangan keuangan bahwa perimbangan salah satunya terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU)). DAU adalah salah satu dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang asalnya dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi (Ardhana 2023). Dibawah ini merupakan tabel DAU di Kabupaten Brebes tahun 2022 sampai 2023.

Tabel 4. Realisasi DAU

Bulan	Realisasi DAU Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	Realisasi DAU Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan
Januari	205.016.500.000	0,00	152.655.552.000	-0,88
Februari	308.297.350.000	0,50	76.327.776.000	-0,50
Maret	411.578.200.000	0,34	170.627.124.000	1,24
April	514.858.851.300	0,25	76.327.776.000	-0,55
Mei	618.139.701.300	0,20	76.327.776.000	0,00
Juni	721.420.551.300	0,17	76.579.255.000	0,00
Juli	824.701.401.300	0,14	210.697.992.000	1,75
Agustus	927.982.251.300	0,13	82.405.105.000	-0,61
September	1.027.830.571.360	0,11	81.663.683.253	-0,01

Oktober	1.126.810.921.360	0,10	160.016.451.969	0,96
November	1.230.091.817.360	0,09	86.389.995.211	-0,46
Desember	1.230.091.817.360	0,00	81.708.652.995	-0,05

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah(BPKAD) (data diolah.2024)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Kabupaten Brebes setiap tahunnya mengalami fluktuasi yakni perubahan naik turun. Dana alokasi umum Pada bulan Januari tahun 2022 ada kenaikan ke bulan Februari tahun 2022 sebanyak 0,50 kemudian pada bulan Maret tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,34 pada bulan April tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebanyak 0,25 pada bulan Mei tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,20 pada bulan Juni tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,17 pada bulan Juli tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,14 pada bulan Agustus tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,13 pada bulan September tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,11 pada bulan Oktober tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,10 pada bulan November tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,09 pada bulan Desember tahun 2022 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebanyak 0,00 namun pada bulan Januari tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak -0,94 pada bulan Februari tahun 2023 mengalami penurunan lagi sebanyak 0,50 kemudian pada bulan Maret tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 1,24 pada bulan April tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebanyak -0,55 pada bulan Mei tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebanyak 0,00 pada bulan Juni tahun 2023 juga masih sama tidak ada kenaikan maupun penurunan pada bulan Juli tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 1,75, pada bulan Agustus tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak -0,61 pada bulan September tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak -0,01 pada bulan Oktober tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak -0,96 pada bulan November tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak -0,46 dan pada bulan Desember tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebanyak -0,05 Dengan ini yang menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes mengalami ke tidak seimbangan pada Dana Alokasi Umum pada tahun 2022 sampai 2023. Maka berdasarkan data tersebut didapatkan fenomena berupa masih sedikitnya tingkat pertumbuhan PAD dan Belanja Modal serta terdapat adanya pertumbuhan pendapatan DAU yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan belum baik.

Tinjauan Pustaka dan pengembangan hipotesis Teori Keagenan(*agensi theory*)

Teori agensi merupakan salah satu teori ekonomi yang menjabarkan mengenai hubungan antara kedua pihak ialah prinsipal serta agen. Prinsipal adalah suatu pihak untuk memberikan suatu perintah, sedangkan agen adalah pihak yang menerima perintah dari prinsipal. Menurut pendapat Jensen dan Meckling bahwa hubungan antara prinsipal dan agen akan menimbulkan konflik kepentingan hal ini disebabkan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang tidak sama (Prayuda and Arifin 2024).

Kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut mardiasmo (Siallagan and Kusmilawaty 2023) Menjelaskan bahwa kinerja yaitu hasil kerja secara kualitas yang di capai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Kinerja keuangan daerah merupakan indikator sebagai pengukur sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan tugasnya apakah berhasil atau tidak (Amaradila et al. 2023). Penjelasan mengenai masing-masing variabel kedalam ukuran dan sekala data dapat diketahui dibawah ini:

1. Rasio kemampuan Keuangan Daerah:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan asli daerah}}{\text{pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Faizah(2022)

Semakin tinggi nilai Rasio kemampuan pendapatan asli Daerah semakin mampu daerah tersebut dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

2. Rasio Belanja Modal:

$$\frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Sumber: fathan (Ernawati 2023)

Berdasarkan rasio tersebut laporan bisa mengerti ukuran belanja daerah yang digunakan dalam investasi dengan bentuk belanja modal pada periode anggaran bersangkutan.

3. Rasio ketergantungan keuangan daerah

$$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Pradana and Handayani (2023)

Berdasarkan rasio tersebut semakin naiknya nilai Rasio ketergantungan keuangan daerah, menunjukkan semakin tingginya ketergantungan daerah terhadap.

4. Rasio Efisiensi kinerja keuangan

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pedapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (Nurul Sukma Handayani 2019)

Kinerja keuangan pemerintah daerah bisa disebut efisien ketika rasio yang didapatkan < 1 (satu)/dibawah 100%. Maka semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik

Pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 22 tahun 2004 pendapatan asli daerah yaitu sumber pendapatan daerah yang memberikan dana pada pembangunan serta usaha untuk mengurangi tingkat ketergantungan dana dari pemerintah daerah (Banunaek et al. 2022). Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan aturan dari undang-undang(Roni et al. 2020). Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 PAD dibagi menjadi empat jenis pendapatan seperti retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hasil usaha milik daerah, dan PAD lain-lain yang sah (Ramadhan 2019). Jenis-jenis PAD yaitu:

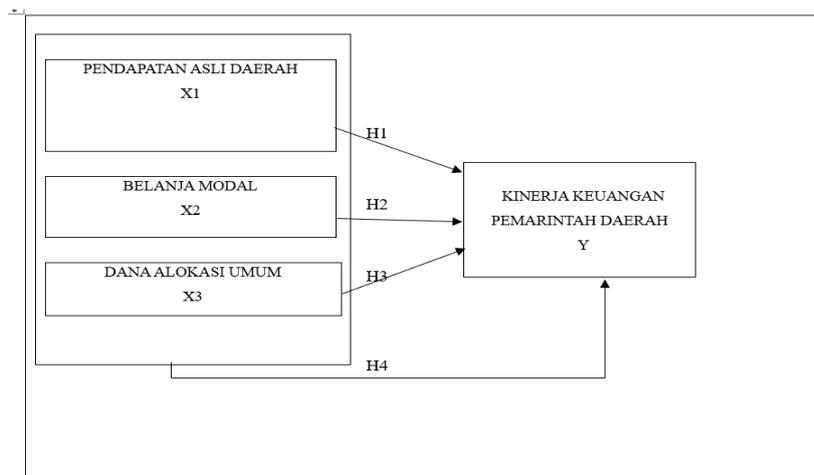
1. Pajak Daerah terdiri dari Pajak provinsi dan Pajak kota/kabupaten,
2. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi jasa umum, Jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah pendapatan daerah berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pembagian hasil atas penyertaan modal di perusahaan baik yang dimiliki daerah maupun BUMD.
4. Lain-lain PAD ialah penghasilan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pendapatan didapatkan dari penjualan aset yang dimiliki daerah serta pendapatan jasa giro.

Belanja Modal

Belanja modal pemerintah daerah adalah pengeluaran yang mendukung anggaran lebih dari satu tahun, dapat meningkatkan aset dan kekayaan daerah, dan juga akan menambahkan biaya reguler seperti biaya pemeliharaan ke kelompok biaya operasional (Ayu and Azhar 2023). Jenis-jenis belanja modal ialah: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

Dana alokasi umum (DAU)

Menurut Fauziah (Nurvaliza and Putra 2024) Semua Kabupaten dan kota menerima bantuan umum dari Dana Alokasi Umum, yang disalurkan berdasarkan rumus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum menunjukkan bahwa daerah yang kurang mampu harus menerima lebih dari daerah yang lebih mampu. Tujuan dari dana ini adalah untuk menutup kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan permintaan. Tujuan dari dana alokasi umum adalah untuk menyediakan dana untuk pengembangan kapasitas keuangan interregional untuk persyaratan pengeluaran yang terkait dengan implementasi desentralisasi. Berikut ini adalah deskripsi dari kerangka berpikir berdasarkan penjelasan variabel yang disebutkan di atas:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas maka dibuatkanlah hipotesis sebagai berikut:

- H1: Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
- H2: Belanja Modal diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
- H3: Dana Alokasi Umum diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
- H4: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Pada jenis Penelitian tersebut ialah penelitian deskriptif kuantitatif dan memiliki dalam menjelaskan mengenai fenomena empiris serta disertai statistik data. Karakteristik pada hubungan berpola antar variabel ialah pengaruh PAD, Belanja, Modal dan DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Waktu periode yang dipakai pada penelitian tersebut di dapatkan semenjak tahun 2022-2023. Data penelitian ini ambil dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Penggunaan data pada penelitian ialah data

sekunder berupa laporan bulanan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2022-2023. Variabel independen yang digunakan ialah PAD, Belanja modal, DAU. Variabel dependennya ialah kinerja keuangan. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji klasik, linier berganda, uji parsial(t), uji simultan (F) dan koefisien determinasi. Alat yang digunakan untuk menganalisis SPSS22.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Data Penelitian

Analisis data yang dilakukan yang berisikan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, Pengujian statistik ini memakai SPSS 22 ialah:

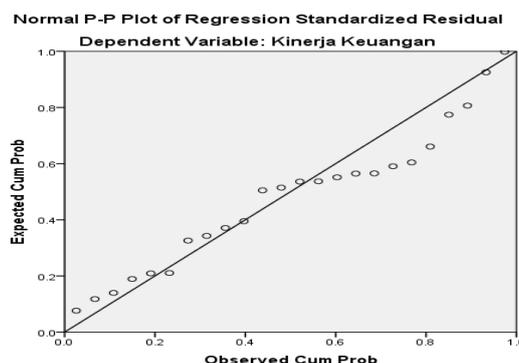
Tabel 5. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	24	4.97	33.65	12.4896	7.48184
Belanja Modal	24	.00	28.21	11.8988	9.21239
Dana Alokasi Umum	24	27.74	94.88	51.7450	15.75862
Kinerja Keuangan	24	27.32	186.35	70.8454	38.10677
Valid N (listwise)	24				

Nilai dari hasil analisis deskriptif variabel PAD Kabupaten Brebes anggaran tahun 2022-2023 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebanyak 12,4896 untuk simpangan baku (*Standar deviation*) sebanyak 7,48184 dan nilai paling tinggi (*maximum*) sebanyak 33,65 serta nilai paling rendah (*minimum*) sebanyak 4,97. Nilai dari analisis deskriptif dari variabel belanja modal Kabupaten Brebes anggaran Tahun 2022 – 2023 mempunyai nilai rata – rata (*mean*) sebanyak 11,8988 untuk simpangan baku (*standar deviation*) sebanyak 9,21239 dan Nilai paling banyak(*maximum*) sebanyak 28,21 serta nilai paling sedikit (*minimum*) sebesar 0,00. Hasil dari analisis deskriptif yang bersumber variabel DAU Kabupaten Brebes Anggaran Tahun 2022 – 2023 mempunyai rata – rata nilai (*mean*) sebanyak 51,7450 untuk simpangan baku (*standar deviation*) sebanyak 15,75862 dan Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 94,88 serta nilai paling sedikit (*minimum*) sebesar 27,74. Nilai dari analisis deskriptif yang bersumber Kinerja Keuangan Kabupaten Brebes anggaran tahun Tahun 2022 – 2023 mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebanyak 70,8454 untuk simpangan baku (*standar deviation*) sebanyak 38,10677 dan nilai paling tinggi (*maximum*) sebanyak 186,35 serta nilai paling rendah (*minimum*) sebanyak 27,32.

Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan grafik normal *p-p plot of tegresion standardized residual*



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Plot

Seperti yang terlihat pada gambar 2, dapat dilihat plotting (titik - titik) yang menggambarkan bahwa data tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dari itu model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa baik asumsi normalitas dan nilai residual distribusi normal dipenuhi, memungkinkan penulis untuk melanjutkan ke tes berikut.

Uji Multikolinearitas

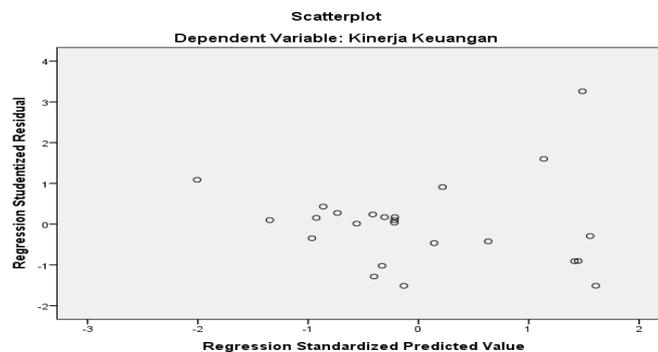
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	.850	1.176
	Belanja Modal	.778	1.286
	Dana Alokasi Umum	.675	1.482

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Hal ini dapat diamati bahwa VIF (*Variance Inflation Factor*) nilai pada PAD dan belanja modal, DAU adalah 1.176, 1.286, dan 1.482, masing-masing, kemudian variabel independen < 10. Hal ini juga dapat diamati bahwa nilai Toleransi PAD, Belanja modal, dan DAU adalah, masing-masing, 0,850, 0,778, dan 0,675, kemudian variabel independen > 0,100. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa multikolinearitas tidak ada. Penulis sekarang dapat melanjutkan ke ujian berikut.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Scatterplot

Mengakui bahwa pola itu tidak jelas dan bahwa titik-titik itu didistribusikan di atas dan di bawah nol. Maka tidak ada heteroskedastisitas. dalam data. Tes Glaser, yang dijelaskan di bawah ini, akan digunakan untuk memastikan bahwa data tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.322	16.146		2.126	.046
	Pendapatan Asli Daerah	.605	.404	.296	1.496	.150
	Belanja Modal	-.387	.343	-.233	-1.128	.273
	Dana Alokasi Umum	-.438	.216	-.452	-2.033	.056

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: SPSS22

Hal ini diketahui bahwa ketika nilai signifikan untuk Belanja modal, DAU, dan PAD lebih dari 0,05, heteroseksualitas tidak terjadi dalam data.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	1.44624
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	12
Total Cases	24
Number of Runs	15
Z	.626
Asymp. Sig. (2-tailed)	.531
a. Median	

Hasil tes *Autocorrelation* menggunakan Metode Run Test menghasilkan nilai Asymp.sig (2-tailed). seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 7 ialah $0.531 > 0.05$ tingkat signifikansi . Penulis dapat melanjutkan ke tes berikutnya setelah menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi auto-korelasi.

Regresi linier

Tabel 9. Uji Linear Berganda

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	56.686	27.626		2.052	.053
	Pendapatan Asli Daerah	2.885	.692	.566	4.170	.000
	Belanja Modal	1.073	.588	.259	1.826	.083
	Dana Alokasi Umum	-.669	.369	-.277	-1.815	.085

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Diliat tabel 9 bisa diketahui pada kolom *B Unstandardized Coefficient* yaitu $Y = 56,686 + 2,885 (PAD) + 1,073 (Belanja\ modal) - 0,669 (DAU)$. Penjelasan dari persamaan dibawah ini:

1. Nilai konstanta sebanyak 56,686 maksudnya ketika seluruh variabel independen ialah PAD, Belanja modal, dan DAU, memiliki nilai ialah 0, dengan ini Kinerja Keuangan Daerah memiliki nilai yaitu 56,686.
2. Koefisien regresi variabel PAD memiliki nilai 2,885 maka diketahui setiap ada kenaikan PAD sebanyak 1% dengan ini adanya kenaikan kinerja keuangan daerah sebanyak 2,885.
3. Koefisien regresi variabel Belanja modal bernilai 1.073 dengan ini bisa mengarahkan ketika setiap kenaikan Belanja modal sebanyak 1% kemudian diikuti juga naiknya kinerja keuangan daerah sebanyak 1,073.
4. Koefisien regresi variabel DAU nilainya -0,669 dengan ini bisa menjelaskan ketika setiap naiknya DAU sebanyak 1% maka ikutnya penurunan kinerja keuangan daerah sebanyak - 0,669.

Uji Parsial (t)

Uji ini menggunakan signifikan dengan tingkat 0,05 .Hasil uji koefisien parsial ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Parsial

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	56.686	27.626		2.052	.053
	Pendapatan Asli Daerah	2.885	.692	.566	4.170	.000
	Belanja Modal	1.073	.588	.259	1.826	.083
	Dana Alokasi Umum	-.669	.369	-.277	-1.815	.085

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berikut adalah hasil uji signifikansi parameter individu (uji t), berdasarkan tabel 10 di atas:

1. Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah. sesuai signifikan ketika nilai sig. lebih kecil asal (<) 0,05 maka bisa per jelas bahwa H0 diterima namun Bila nilai signifikansinya lebih besar asal 0,05 maka dapat diperjelas bahwa H0 tolak. ditinjau dari tabel pada 9 maka dapat di ketahui bahwa PAD mempunyai Sig.m nilainya 0,000 serta T hitung sebesar 4,170. sebab nilai sig. nya lebih kecil asal 0,05 (0,000 < 0,05) serta nilai T hitungnya lebih besar dari (>)T tabel 1,725 (4,170 > 1,725). Dengan ini H0 diterima serta Ha ditolak. Dengan hal tadi maka bisa disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan dengan ini H1 **diterima**.
2. Pengaruh Belanja modal terhadap Kinerja Keuangan daerah sesuai signifikansi, Bila sig. Lebih kecil asal(<) 0,05 maka Ho diterima. dan jika sig. lebih kecil dari 0,05 maka Ho terima . ketika diketahui di tabel 9 jadi belanja modal mempunyai Sig. nilainya 0,083 serta nilai t hitung sebanyak 1,826 oleh sebab itu sig. nilainya pada uji t lebih banyak/besar dari 0,05 (0,083 > 0,05) serta nilai thitung > t tabel 1,725 (1,826 > 1,725). menggunakan yang akan terjadi tersebut maka bisa dijelaskan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh positif namun tak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Maka H2 diterima. Belanja modal bisa pada artikan menjadi investasi Pemerintah Daerah tetapi bukan bertujuan buat mencari profit. Aktivitas belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bisa membuat sumber-sumber keuangan beberapa tahun lalu serta bisa menyampaikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
3. Pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan daerah sesuai signifikansi. saat sig. < 0.05 maka Ho diterima. Kemudian ketika sig. > 0,05 dan Ho ditolak. Dilihat di tabel 9 bahwa DAU memiliki nilai Sig. 0,085 serta nilai t hitung sebanyak - 1,815 oleh karena itu nilai signifikansi di uji t lebih besar asal 0.05 (0.085 > 0.05) serta dan nilai t hitung < t tabel (- 1.815<1.725). maka Ho ditolak serta Ha di terima. dengan demikian bisa disimpulkan bahwa DAU secara parsial tak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Dengan hasil ini hipotesis H3 **ditolak**.

Hasil uji F

Pengujian secara simultan dilaksanakan membandingkan nilai F sig dengan 0,05

Tabel 11. Uji Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22916.059	3	7638.686	14.574	.000 ^b
	Residual	10482.839	20	524.142		
	Total	33398.898	23			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
 b. Predictors: (Constant). Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah. Blanja Modal

Pada Tabel 11 diketahui akibat perhitungan regresi menggunakan nilai F hitung sebanyak 14,574 menggunakan nilai signifikansi sebanyak 0,000 kemudian nilai F tabel sebanyak 3,098 Maka bisa dijelaskan bahwa nilai F hitung > F tabel (14.574 > 3.098) bisa diartikan bahwa secara gabungan variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Maka H4 **diterima**.

Uji koefisien determinasi (R²)

Tabel 12. Uji Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 ^a	.686	.639	22.89415
a. Predictors: (Constant). Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah. Belanja Modal				
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan				

Nilai *Adjusted R Square* yang disesuaikan dalam Tabel 11 adalah 64%, atau 0,639 dengan variabel bahwa PAD, Belanja modal, dan DAU dan dengan faktor tambahan yang tidak termasuk dalam model penelitian mempengaruhi 36% lainnya.

Pembahasan

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Studi dengan tabel 9 menggunakan uji hipotesis parsial (t) dan menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Brebes pada tahun 2022-2023, seperti yang ditunjukkan oleh sig. nilai 0,000 < 0,05 dan tabel T hitung > T (4,170 > 1,725). Ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat di daerah Brebes melakukan potensi keuangan secara lebih baik dengan adanya kenaikan PAD. Temuan penelitian ini sama dengan Bilqis dan Priyono (2023), yang mengklaim bahwa PAD mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini berbeda dengan temuan Antari dan Sadana (2023). Hasil uji hipotesis parsial penelitian (Uji t) menunjukkan bahwa t hitung > t table 1,725 (1,826 < 1,725) dan sig. (0,083) > (0,05). Hal ini ditentukan bahwa pada tahun 2022-2023, Belanja modal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan pada kinerja keuangan daerah pemerintah Brebes. Dapat disimpulkan bahwa belanja modal yang diperoleh dapat sebagian mengimbangi kegiatan penyeimbangan modal pemerintah, yang dapat menghasilkan dana beberapa tahun kemudian dan berkontribusi pada pendapatan daerah, sehingga meningkatkan kinerja keuangan daerah, meskipun tidak sepenuhnya. Temuan dari penelitian ini sama dengan penelitian oleh Lathifa & Haryanto (2019) yang memukakan belanja modal meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan studi (Putri et al. 2023) yang mengemukakan bahwa belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah setempat. Selain itu, jelas dari temuan uji hipotesis parsial tabel 9 bahwa t hitung < t table adalah 1,728 (-1,815 > 1,725) dan bahwa nilai signifikansi 0.083 > 0.05 telah dicapai. Prestasi keuangan pemerintah Pemerintah Brebes untuk tahun anggaran 2022-2023 ditentukan untuk independen dari DAU. Karena DAU adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat dan dimaksudkan untuk membantu membiayai pengeluaran berlebihan di daerah ini untuk mencegah defisit, DAU tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, diartikan bahwa DAU tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan. Pernyataan ini sejalan dengan temuan dari studi yang dilakukan oleh Rohanda dan Azhar (2023), yang menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki dampak pada kinerja keuangan karena tidak berasal dari hasil pemerintah daerah sendiri dalam realisasi pendapatan daerah. Namun berdasarkan penelitian dari Sari dan Halmawati (2023 menyebutkan bahwa Dana

Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil dari hipotesis uji simultan (Uji F) di tabel 10 menunjukkan bahwa hasil sig. 0,000 kurang dari nilai 05, dan nilai F hitung > F tabel adalah $14,574 < 3,028$. Ini menunjukkan bahwa PAD, Belanja Modal, dan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah di wilayah Brebes selama tahun pemilihan 2022-2023. selanjutnya, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di Tabel 11 hasilnya menunjukkan bahwa variabel yang terkait dengan kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh PAD, Belanja Modal, dan DAU sebanyak 64%, sementara 36% yang tersisa dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Bersama-sama, PAD, Belanja Modal, dan DAU memiliki dampak negatif pada keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan ketika sumber daya didistribusikan secara efektif di antara semua pihak dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan untuk melaksanakan operasi pemerintah daerah dan memajukan pembangunan didaerahnya dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian , dapat disimpulkan berikut ini: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Belanja Modal Berpengaruh Positif Namun Tidak Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaradila, Mike Et Al. 2023. "Pengaruh Pad, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021." *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 7(2):253–67. Doi: 10.24269/Iso.V7i2.2187.
- Anggih, Anggih, And Anisa Sains Kharisma. 2023. "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Jumlah Umkm Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wanasari." *Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 1(2):91–101. Doi: 10.57235/Jamparing.V1i2.1006.
- Ardhana, Muhammad Anugrah. 2023. "Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan." *Management And Accounting Research Statistics* 3(1):84–105. Doi: 10.59583/Mars.V3i1.23.
- Ayu Rohanda, And Iqlima Azhar. 2023. "Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Aceh Tamiang)." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* 4(5):287–301. Doi: 10.33059/Jmas.V4i5.8367.
- Banunaek, Irma Angriani Et Al. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Ukuran Pemerintah Daerah , Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)." 4(1):49–59.
- Ernawati, Yusrida. 2023. "Analysis Of The Influence Of Financial Performance And Capital Expenditure On Economic Growth (Study On Medan City Government)." 143–58.
- Faizah, Alqi. 2022. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemandirian Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Pemoderasi.*
- Muafiq, Rahmat Rizal, And Anis Chariri. 2023. "Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Penyerapan Anggaran, Belanja Modal, Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi." *Diponegoro Journal Of Accounting* 12(4):1–15.

- Nadia Febrianty, And Gerry Hamdani Putra. 2023. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021." *Jurnal Kendali Akuntansi* 1(2):30-46. Doi: 10.59581/Jka-Widyakarya.V1i2.154.
- Ni Putu Ayu Septiyani Putri Et Al. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021." *Jurnal Akuntansi Profesi* 14(01):133-47. Doi: 10.23887/Jap.V14i01.62916.
- Nurul Sukma Handayani. 2019. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Dikalimantan Timur." 1-12.
- Nurvaliza, Siti, And Gerry Hamdani Putra. 2024. "Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat." 4:739-47.
- Pradana, Era Yunian, And Nur Handayani. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)* 2(2):192-209. Doi: 10.24034/Jiaku.V2i2.5979.
- Pratiwi, Tri Yuni. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016." *Jurnal Profita* 7(3).
- Prayuda, Yoga Wisnu, And Johan Arifin. 2024. "Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia." 6:77-87.
- Prihatin, Dwi Yuliana Et Al. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2(3):39-48. Doi: 10.55047/Transekonomika.V2i3.125.
- Rizqy Ramadhan, Puja. 2019. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi* 5(1):81. Doi: 10.31289/Jab.V5i1.2455.
- Roni, Roni Et Al. 2020. "Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Journal Of Accounting And Finance (Jacfin)* 1(1):37-51.
- Yuni Tirtasari Siallagan, And Kusmilawaty Kusmilawaty. 2023. "Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Jupiekes)* 2(1).